

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
1	Muhammad Syafii dan Djoko Suwandono, 2015, "Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak", UNDIP Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi pengembangan dan pengelolaan desa wisata di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan pendekatan konsep Community Based Tourism (CBT).	Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan dibagi dalam tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bedono memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi atraksi wisata alam seperti pantai dan ekosistem mangrove, serta makam Syeikh Abdullah Mudzakir yang didukung oleh komitmen yang tinggi dari pemerintah desa untuk pembentukan desa wisata. Namun kesiapan SDM masyarakat masih perlu ditingkatkan dan perlunya dibentuk lembaga/organisasi masyarakat pendukung pariwisata seperti kelompok sadar wisata. 2. Melalui desa wisata dengan dilibatkannya masyarakat sebagai pengelola bukan hanya bertujuan untuk

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				<p>hanya memberdayakan masyarakat desa tetapi dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dengan menjadikan desa sebagai tujuan wisata namun demi menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang ada dan juga pelestarian nilai-nilai budaya religi yang berlaku dimasyarakat.</p>
2	<p>Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti, 2016, “Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)”, Fak. Teknik, UNDIP Semarang</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat organisasi, organisasi telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata. Sedangkan pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, POKDARWIS “Ketenger Adventure” menunjukkan kapasitas yang kurang baik. Sedangkan pada tingkat individu, individu</p>

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				<p>memiliki kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Individu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan terhadap wisatawan. Namun individu memiliki kapasitas yang kurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Desa Ketenger telah mendapatkan program-program peningkatan kapasitas yang didakan baik dari Dinas Pariwisata maupun organisasi lainnya. Namun berdasarkan temuan studi tentang kapasitas insitutional masyarakat ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya program-program lanjutan untuk</p>

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				peningkatan kapasitas masyarakat.
3	Fithria Khairina Damanik and Wiwik Dwi Pratiwi, 2017, "Consideration of Tourism Riverfront Development Elements for Pekanbaru City Transformation", ITB, ASPI dan IAP	Tujuan penelitian ini adalah membahas konsiderasi elemen pengembangan kawasan pariwisata riverfront Sungai Siak dengan fokus lokasi di Kelurahan Kampung Bandar dan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan. Elemen pengembangan kawasan riverfront yang terdiri dari fungsi, citra, tema, faktor geografis, autentisitas, aksesibilitas, persepsi, dan manajemen berdasarkan	Metode yang digunakan adalah metode campuran di mana pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat dan wisatawan terkait dengan kawasan pengembangan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis kepariwisataan terkait dengan elemen pengembangan kawasan pariwisata riverfront.	Berdasarkan analisis yang dilakukan, kedua kelurahan telah memiliki elemen-elemen tersebut dan dapat menjadi awal mula pengembangan kawasan pariwisata riverfront di Kota Pekanbaru, namun masih memerlukan strategi pengembangan sebagai sebuah destinasi wisata baru. Rekomendasi pengembangan yang disarankan terdiri dari strategi pengembangan destinasi meliputi pengembangan daya tarik wisata, fasilitas kepariwisataan, aksesibilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, serta strategi pengembangan tambahan meliputi pengembangan promosi dan organisasi kepariwisataan.

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
		modifikasi teori oleh Toree (1989) dan Wren (1983).		
4	Revalda A. J. B. Salakory, 2017, "Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah", Universitas Brawijaya Malang	Tujuan dari penulisan ini adalah merumuskan konsep pengembangan ekowisata berbasis masyarakat guna sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pengembangan.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil analisis menunjukkan bahwa Dalam merancang suatu konsep serta strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, hal mendasar yang harus dilakukan adalah mengenalkan masyarakat tentang konsep ekowisata dikarenakan sebagian besar pengelolaan destinasi di Kepulauan Banda maupun daerah Maluku masih jauh dari konsep ekowisata yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kehadiran destinasi ekowisata agar kegiatan pengembangan sesuai dengan keinginan

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan wisatawan.
5	Khusnul Khotimah Wilopo, dan Luchman Hakim, 2017, "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto)", Universitas Brawijaya Malang	Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya di kawasan situs Trowulan. Strategi tersebut terkait dengan upaya yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dan menjadikan kawasan Trowulan agar dapat memberikan kontribusinya dalam peningkatan pemasukan atau pendapatan asli daerah, membuka lahan kerja baru dan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis eksploratif.	Hasil dari penulisan ini adalah tersusunnya strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan destinasi pariwisata budaya di kawasan situs Trowulan meliputi 1). Pengemasan produk daya tarik wisata melalui paket wisata minat khusus. 2). Pengembangan Destination Image. 3). Pengembangan promosi melalui media cetak maupun elektronik dan mengikuti event-event nasional. 4). Pengembangan aksesibilitas jalan, transportasi, petunjuk arah. 5). Pengembangan amenitas berupa hotel, homestay, pusat informasi pariwisata dan pusat seni kerajinan. 6). Penambahan fasilitas pendukung berupa klinik kesehatan, pos keamanan pariwisata, money changer, ATM. 7). Pembentukan badan

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
		membantu dalam usaha pengentasan kemiskinan di wilayah sekitar kawasan situs Trowulan.		pengelola kawasan situs Trowulan dan 8). Pengembangan SDM di bidang pariwisata.
6	Dr.Risna Resnawaty, S.Sos., M.P, 2016, “Strategi Community Practice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat”, Social Work Jurnal	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi community practice dalam pengembangan pariwisata di Pulau Tidung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Seribu.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil Penelitian adalah Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diakui masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan terhadap berbagai system sumber penghidupan seperti pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan.
7	Dwi Bayu Prasetya, dan Zulqadri Ansar, 2017, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok	Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan strategi dan rekomendasi terhadap pengembangan dan pengelolaan desa wisata di kawasan wisata	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi dan masalah pada wilayah penelitian yang dilakukan analisis, selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan kawasan wisata Danau Ranau berbasis Community Based Tourism (CBT). Strategi dan pendekatan

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
	Seminung Lampung Barat”, Institut Teknologi Sumatera (ITERA).	Danau Ranau Lumbok Seminung.		yang dapat diterapkan di Kawasan Wisata Danau Ranau Lumbok Seminung dengan pendekatan Community Based Tourism (CBT) diantaranya, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, mengedukasi masyarakat terkait cara berinteraksi dengan wisatawan; meningkatkan kualitas pengorganisasian masyarakat sadar wisata, memberi peluang masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di Kawasan Danau Ranau, membentuk organisasi masyarakat budaya di kawasan wisata, pengembangan kegiatan wisata alam, budaya serta buatan, dan meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung, bekerjasama antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat dalam pemanduan wisata.

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
8	Yusuf Adam Hilman, 2017, "Kelembagaan Kebijakan Pariwisata Di Level Desa", Universitas Muhammadiyah Ponorogo.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan di Desa.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan Cara kelembagaan sebuah kebijakan yang baik, diantaranya harus dapat dilakukan secara bersinergi, antar lembaga dengan masyarakat melalui para stakeholder atau pengambil kebijakan yang terlibat langsung, guna menemukan kemitraan dan juga pola organisasi pemerintahan yang relevan dengan kondisi desa. Relevansi konsep tersebut ditekankan pada peranan masing – masing elemen, dalam proses awal hingga akhir dalam sebuah kebijakan, sehingga dapat dipadukan dan dijalankan secara bersinergi. Selain itu, aspek transparansi, dan proses yang partisipatif harus menjadi semangat dari pembuatan kebijakan, sehingga kelembagaan yang terbentuk dapat di laksanakan secara

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				kontekstual dengan keadaan yang diharapkan bersama.
9	Rony Ika Setiawan, 2016, "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan sumber daya manusia di Bidang Pariwisata dikaji dari sudut pandang potensi wisata daerah berkembang. Keberadaan SDM diduga berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment).	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat induktif. Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan daya dukung dari banyak stakeholder (public, private, dan society) sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Keberhasilan pengembangan kawasan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transparansi dan kenyamanan bagi para investor maupun

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				wisatawan dalam menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata.
10	Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga, 2016, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara", Universitas Medan Area	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli Utara.	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian peran Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
				mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.
11	Sulthon Rohmadin, 2016, "Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur", IPDN	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende dalam rangka pengembangan kawasan wisata berbasis pembangunan berkelanjutan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif.	.Hasil penelitian berupa aspek-aspek yang memengaruhi pariwisata di Kabupaten Ende. Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi bertujuan untuk mengetahui isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknes, Opportunities, Threats). Kemudian isu-isu di analisis sesuai dengan strategi pengembangan kepariwisataan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende.
12	Gina Lestari, 2016, "Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan partisipasi pemuda dalam pengembangan pariwisata	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan prosedur metode campuran konkuren yang mengkombinasikan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan pemuda merupakan bagian dari aktor pengelola CBT di Desa Wisata Pentingsari (Dewi Peri). Partisipasi p emuda berada pada tingkat partisipasi

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
	Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)", UGM	berbasis masyarakat (CBT) dan kontribusinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah.	kualitatif dengan kuantitatif.	citizen power dengan bobot rata-rata sebesar 70 persen. Model pengembangan CBT di Dewi Peri memungkinkan seluruh masyarakat terlibat secara aktif sebagai aktor utama. Partisipasi pemuda dalam pengembangan CBT di Dewi Peri berkontribusi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berdasarkan parameter asas kemitraan, kesejahteraan, perlindungan, kemandirian, kerukunan, nilai sosial dan budaya lokal. Ketahanan sosial budaya wilayah terbentuk melalui pelestarian sosial budaya secara dinamis dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sosial-budaya lokal melalui aktivitas pariwisata.
13	Tunggul Prasodjo, 2017, "Pengembangan Pariwisata Budaya dalam	Tujuan penelitian adalah Guna meningkatkan daya tarik	Metode deskriptif kualitatif	Kajian ringkas ini coba menganalisa upaya pengembangan pariwisata budaya dari sudut pandang

No	Penulis, Tahun, Judul, Penerbit	Tujuan Penelitian	Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian	Hasil Temuan
	Perspektif Pelayanan Publik”, STISIP Makassar.	wisatawan, kemampuan manajemen dari objek pariwisata itu baik untuk mengembangkan atau pun melayani sangat menentukan kualitas keterterikan wisatawan. Kajian ringkas ini coba menganalisa upaya pengembangan pariwisata budaya dari sudut pandang administrasi dan pelayanan publik.		administrasi dan pelayanan publik. Kebutuhan wisatawan secara administratif, berhubungan erat juga dengan kebutuhan pelayanan.. Pelayanan yang baik oleh pengelola pariwisata akan berbanding lurus dengan perkembangan objek wisata tersebut. Selain itu, guna menguatkan daya tarik bagi wisatawan yang lebih luas, maka diperlukan sistem pemasaran yang baik.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengembangan Pariwisata

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan matching dan adjustment yang terus menerus antara sisi supply dan demand kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan (Nuryanti, 1993). Sedangkan pengembangan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek wisata dengan cara melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun nonfisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan produktivitas.

Potensi wisata menurut Mariotti dalam Yoeti (1983) adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu.

Pada tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007). Disamping itu untuk dapat melakukan pengembangan perlu memperhatikan berbagai aspek, suatu objek wisata yang akan dikembangkan harus memperhatikan syarat-syarat pengembangan daerah menjadi objek wisata yang dapat diandalkan, yaitu :

1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi objek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan dana yang ada.
2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai latar belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait.
3. Pengukuran jarak antar potensi, pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta agihan potensi objek wisata.

Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu: 1) menggalakkan ekonomi, 2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli,1995).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
4. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
5. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
6. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
7. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata;
8. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Dan menjelaskan tentang Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta

pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan Community Based Tourism, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata.

2.2.2. Kebijakan dan Pelaksanaan

A. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) pelaksanaan kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang

dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.

Menurut R.S. Parker (Solichin, 1990:31) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu objek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

Menurut Edward dan Sharkansy (Islamy, 1984:18) adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie (2006:105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)”. Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2007:17) mengemukakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

B. Implementasi Publik

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka pelaksanaan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan pelaksanaan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik organisasi dan sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan VanHorn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukanagen pelaksana. Semakin luas

cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen)pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kecondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.2.3. Penguatan Organisasi

Teori penguatan atau *reinforcement theory of motivation* dikemukakan oleh **B. F. Skinner** (1904-1990) dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya (rangsangan-respons-konsekuensi). Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh dimana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Teori ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian untuk perilaku individu. Namun, tidak fokus pada penyebab perilaku individu.

Menurut Skinner, lingkungan eksternal organisasi harus dirancang secara efektif dan positif sehingga dapat memotivasi karyawan.

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga satu visi dan satu misi yang maju bersama-sama dalam satu wadah dan bertekad bersama dalam mencapai suatu tujuan.

Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan :

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan :

“Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.”

Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa:

“Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3. Critical Review

Dari penelitian terdahulu pada tabel diatas, maka dapat ditarik critical review sebagai berikut:

- 1) Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan konsep Community Based Tourism (CBT) sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih pada komunitas internal sendiri bukan tourism, sehingga dapat diketahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh organisasi internal dalam pengembangan wisata desanya sehingga menjadi desa wisata yang berkembang dengan hasil kreatifitas organisasi internalnya.
- 2) Perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh organisasi dengan individu di desa tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak membedakan antara tindakan individu dengan organisasinya melainkan melihat tindakan organisasi terhadap pengembangan wisata desa.

- 3) Tidak membahas organisasi melainkan elemen-elemen pengembangan pariwisata sehingga tidak hanya SDM yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 4) Penelitian ini lebih pada konsep pengembangan ekowisata berbasis masyarakat tidak pada sebuah komunitas atau organisasi dalam pengembangan wisata, sehingga berbeda pada objek penelitiannya.
- 5) Penelitian ini fokus pada strategi pengurangan kemiskinan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pengembangan wilayahnya bukan pada pengembangan wisata dari strategi yang dilakukan suatu organisasi dalam meningkatkan wisata desa dari potensi yang ada sehingga tidak hanya wisata yang berkembang akan tetapi minat masyarakat juga meningkat.
- 6) Penelitian ini lebih fokus pada peran masyarakat dalam pengembangan wisata bukan peran organisasinya.
- 7) Penelitian ini fokus pada strategi dalam pengembangan wisata berbasis Community Based Tourism (CBT), sehingga berbeda pada penelitian yang akan dilakukan yaitu strategi yang dilakukan organisasi dalam pengembangan wisata desa sehingga peran pemuda desa yang bergabung dalam sebuah organisasi desa ikut mengembangkan potensi desa sehingga strategi pemuda desa yang dipakai dalam pengembangan wisata desanya.
- 8) Penelitian ini lebih pada pola kelembagaan dalam membuat kebijakan kepariwisataan desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini adalah lebih pada kebijakan dan organisasi desa dalam pengelolaan wisata dengan strategi yang muncul dari organisasi pemuda desa.
- 9) Penelitian ini lebih pada strategi pengembangan sumber daya manusia yang berperan pada pengembangan wisata, penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan akan tetapi, lebih pada peran penting organisasi desa yang memiliki strategi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
- 10) Penelitian ini fokusnya pada peran pemerintah bukan organisasinya dalam pengembangan wisata.
- 11) Penelitian ini lebih pada peran Dinas Pariwisata dalam pembangunan wisata tidak pada organisasi desa atau lingkungan sekitar wisata dalam pembangunan atau pengembangan wisatanya.
- 12) Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan akan tetapi tidak menggunakan pendekatan CBT dalam pengembangan pariwisatanya. Sehingga murni dari strategi dan pengelolaan organisasi pemudanya.
- 13) Penelitian ini lebih pada melihat dari sudut pandang administrasi dan pelayanan bukan pada peran organisasi pemuda dalam pengembangan pariwisata.